



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/O/1999

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO. 27/1990

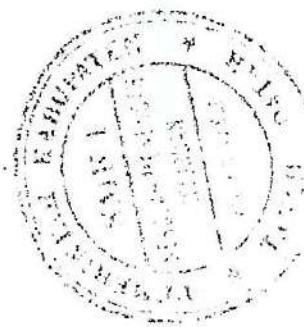
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

berkuasa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1990/1991:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).



Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1980 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3774);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMK/TA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK.

Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pembangunan Aparatur Negara dengan surat Nomor 502/MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 19 Oktober 1999;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERJAAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN
1998/1999.

Mengetahui

Mencap

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

Prasa 2

NAME: 8616593

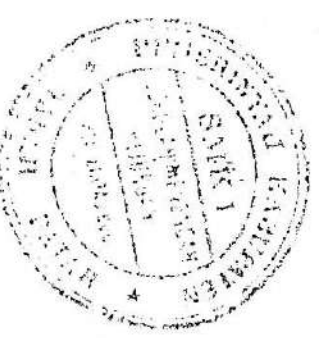
1990

2001.05.02

1

173501

estados. No entanto, há uma grande dificuldade de se obter a informação de propósitos específicos para cada tipo de intervenção, pois os dados disponíveis são limitados e não permitem a obtenção de uma visão clara e abrangente da realidade.



1. Untuk pelaksanaan Koperasi ini, jumlah
dan kolom 7 lampiran 1 Koperasi ini.

- 1. Taman Kanak-kanak
- 2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
- 3. Sekolah Menengah Umum
- 4. Sekolah Menengah Kejuruan
- 5. Yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

(TK)	Negeri	23 buah
(SLTP)	Negeri	10.584 buah
(SMU)	Negeri	2.863 buah
(SMK)	Negeri	783 buah

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 6

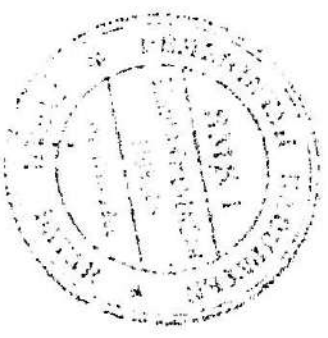
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

JUWONO SUPARSONO

SEKRETARIS Keputusan ini diampukan kepada



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

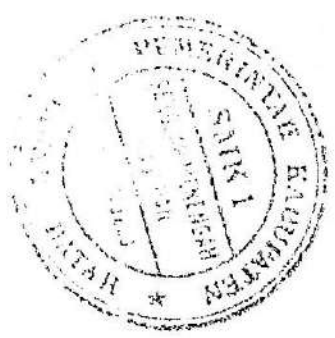
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pemerintahan, Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemaksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektori Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P. J. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
11. Direktur Ferbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Pertendahan dan Kas Negara setempat,
13. Komis V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Sesuai sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

[Signature]

Muslih, S.H.
NIP. 131477478



KAPITULASI LAMPIRAN
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 21/10/1999 TANGGAL 20 OKTOBER 1999

NO. PROFESI

PEMERIKSAAN

PENEGGERAN

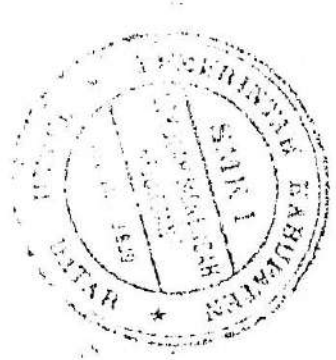
TK. SUB. SLTP. SMO. SWK.

JUMLAH

TK. SLTP. SMO. SWK.

JML. TITIK

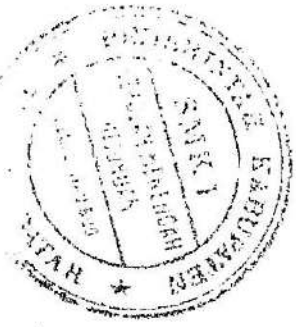
NO.	PROFESI	PEMERIKSAAN	PENEGGERAN	JUMLAH	TK. SUB. SLTP. SMO. SWK.	TK. SLTP. SMO. SWK.	JML. TITIK
1	Dokter	1	1	1	1	1	1
2	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
3	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
4	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
5	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
6	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
7	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
8	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
9	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
10	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
11	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
12	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
13	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
14	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
15	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
16	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
17	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
18	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
19	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
20	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
21	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
22	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
23	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
24	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
25	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
26	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
27	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
28	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
29	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
30	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1



SUMATERA BARAT

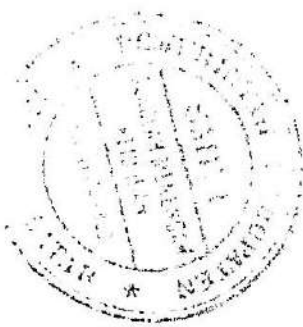
PEMBERIAN

1. SMU Negeri 1 Batang Ane	Sungai Ane	Kabupaten Padang Pasar	11.1.2.4251.23.01.08.5110 11.1.2.4251.23.01.08.5120 11.1.2.4251.23.01.08.5130 11.1.2.4251.23.01.08.5140 11.1.2.4251.23.01.08.5150 11.1.2.4251.23.01.08.5160 11.1.2.4251.23.01.08.5170 11.1.2.4251.23.01.08.5180 11.1.2.4251.23.01.08.5190 11.1.2.4251.23.01.08.5200
2. SMU Negeri 2 Lubuk Alung	Jabu Alung	Kabupaten Padang Lubuk Alung	11.1.2.4251.23.01.08.5210 11.1.2.4251.23.01.08.5220 11.1.2.4251.23.01.08.5230 11.1.2.4251.23.01.08.5240 11.1.2.4251.23.01.08.5250 11.1.2.4251.23.01.08.5260 11.1.2.4251.23.01.08.5270 11.1.2.4251.23.01.08.5280 11.1.2.4251.23.01.08.5290 11.1.2.4251.23.01.08.5300
3. SMU Negeri 3 Solok	Tanjung Harapan	Kabupaten Solok	11.1.2.4251.23.01.08.5310 11.1.2.4251.23.01.08.5320 11.1.2.4251.23.01.08.5330 11.1.2.4251.23.01.08.5340 11.1.2.4251.23.01.08.5350 11.1.2.4251.23.01.08.5360 11.1.2.4251.23.01.08.5370 11.1.2.4251.23.01.08.5380 11.1.2.4251.23.01.08.5390 11.1.2.4251.23.01.08.5400
4. SMU Negeri 4 Talang Kamang	Talang Kamang	Kabupaten Agam	11.1.2.4251.23.01.08.5410 11.1.2.4251.23.01.08.5420 11.1.2.4251.23.01.08.5430 11.1.2.4251.23.01.08.5440 11.1.2.4251.23.01.08.5450 11.1.2.4251.23.01.08.5460 11.1.2.4251.23.01.08.5470 11.1.2.4251.23.01.08.5480 11.1.2.4251.23.01.08.5490 11.1.2.4251.23.01.08.5500
5. SMU Negeri 5 Koto XI Tarusan	Koto XI Tarusan	Kabupaten Pesisir Selatan	11.1.2.4251.23.01.08.5510 11.1.2.4251.23.01.08.5520 11.1.2.4251.23.01.08.5530 11.1.2.4251.23.01.08.5540 11.1.2.4251.23.01.08.5550 11.1.2.4251.23.01.08.5560 11.1.2.4251.23.01.08.5570 11.1.2.4251.23.01.08.5580 11.1.2.4251.23.01.08.5590 11.1.2.4251.23.01.08.5600
6. SMU Negeri 6 IX Koto Sungai Lasi	IX Koto Sungai Lasi	Kabupaten Solok	11.1.2.4251.23.01.08.5610 11.1.2.4251.23.01.08.5620 11.1.2.4251.23.01.08.5630 11.1.2.4251.23.01.08.5640 11.1.2.4251.23.01.08.5650 11.1.2.4251.23.01.08.5660 11.1.2.4251.23.01.08.5670 11.1.2.4251.23.01.08.5680 11.1.2.4251.23.01.08.5690 11.1.2.4251.23.01.08.5700
7. SMU Negeri 7 Sungai Tarab	Sungai Tarab	Kabupaten Tanah Datar	11.1.2.4251.23.01.08.5710 11.1.2.4251.23.01.08.5720 11.1.2.4251.23.01.08.5730 11.1.2.4251.23.01.08.5740 11.1.2.4251.23.01.08.5750 11.1.2.4251.23.01.08.5760 11.1.2.4251.23.01.08.5770 11.1.2.4251.23.01.08.5780 11.1.2.4251.23.01.08.5790 11.1.2.4251.23.01.08.5800



fax (0751) 27510

1	2	3	4	5	6	7
6. SUMATERA BARAT						
A. PEMBUKAAN						
		1. SLIP Negeri 3 Batang Anai	-	Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman	11.1.1.4242.23.01.08.5110 11.1.1.4242.23.01.08.5120 11.1.1.4242.23.01.08.5150 11.1.1.4242.23.01.08.5210 11.1.1.4242.23.01.08.5220 11.1.1.4242.23.01.08.5230 11.1.1.4242.23.01.08.5250 11.1.1.4242.23.01.08.5350
		2. SLIP Negeri 6 Lubuk Alung	-	Lubuk Alung	Kabupaten Padang Pariaman	11.1.1.4242.23.01.08.5350
		3. SMU Negeri 4 Solok	-	Tanjung Harapan	Kotamadya Solok	11.1.2.4251.23.01.08.5110 11.1.2.4251.23.01.08.5120 11.1.2.4251.23.01.08.5150 11.1.2.4251.23.01.08.5210 11.1.2.4251.23.01.08.5220 11.1.2.4251.23.01.08.5230 11.1.2.4251.23.01.08.5250 11.1.2.4251.23.01.08.5350
		4. SMU Negeri 2 Tilatang Kamang	-	Tilatang Kamang	Kabupaten Agam	
		5. SMU Negeri 2 Koto XI Tarusan	-	Koto XI Tarusan	Kabupaten Pasisir Sibolga	
		6. SMU Negeri 1 IX Koto Sungai Lasi	-	IX Koto Sungai Lasi	Kabupaten Solok	
		7. SMU Negeri 2 Sungai Tarab	-	Sungai Tarab	Kabupaten Tanah Datar	



	3	5	6	7
	8. SMK Negeri 1 Tanjung Raya	Tanjung Raya	Kabupaten A	11.1.2.4267.23.01.08.5110 11.1.2.4267.23.01.08.5120 11.1.2.4267.23.01.08.5150 11.1.2.4267.23.01.08.5210 11.1.2.4267.23.01.08.5220 11.1.2.4267.23.01.08.5230 11.1.2.4267.23.01.08.5250 11.1.2.4267.23.01.08.5350
	9. SMK Negeri 1 Batipuh	Batipuh	Kabupaten Tanah Datar	
	10. SMK Negeri 1 Lintau Buo	Lintau Buo	Kabupaten Tanah Datar	

